



Dinamika Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pada Pemilihan Tahun 2024 Di Kabupaten Ciamis

Puji Lestari¹

Erlan Suwarlan²

Abdul Mutholib³

Universitas Galuh¹⁻³

Jl. R. E. Martadinata No. 150 Ciamis

Korespondensi penulis: puji_lestari02@student.unigal.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the political dynamics in the 2024 regional head election (Pilkada) in Ciamis Regency, which featured a single candidate. The phenomenon of single-candidate elections has become increasingly common in Indonesia and raises concerns in the context of local democracy, such as weak political competition, elite domination, and limited choices for voters. This research employs a descriptive qualitative approach using elite theory as the analytical tool, particularly the framework proposed by Mufti (2019), which divides elites into three main dimensions: their position in the social structure, their roles in institutions or organizations, and their control over power resources. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving various informants, including political party members, academics, community leaders, youth figures, and voters who chose the blank box. The findings reveal that the dominance of the incumbent pair, Herdiat-Yana, was backed by all political parties in Ciamis, resulting in the absence of challengers. Public responses varied, from acceptance to choosing the blank box as a form of protest. This phenomenon reflects the limitations of substantive democracy at the local level. The study recommends reforming the regional head candidacy system and strengthening political participation to foster healthy political competition in future elections.*

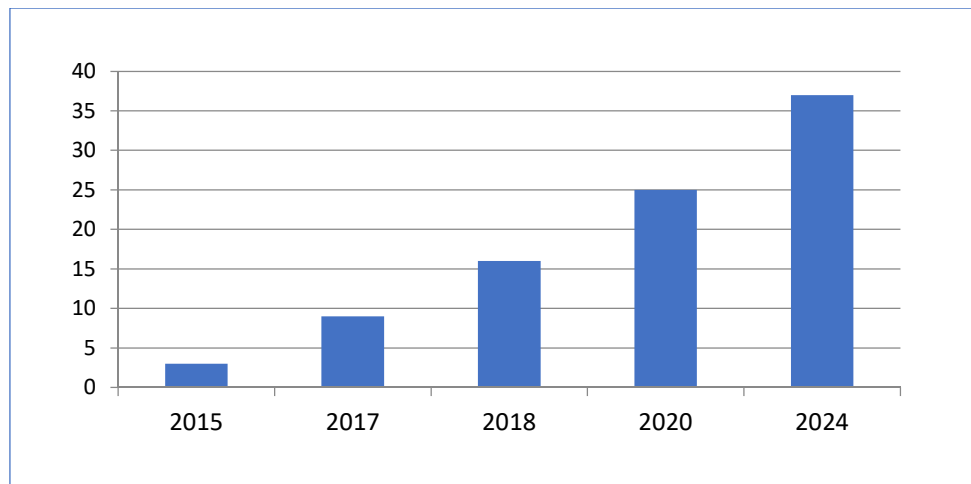
Keywords: *Regional Election, Single Candidate, Political Elites, Local Political Dynamics, Democracy*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal di Kabupaten Ciamis pada tahun 2024. Fenomena calon tunggal dalam pilkada merupakan gejala politik yang semakin marak terjadi di Indonesia dan memunculkan persoalan dalam konteks demokrasi lokal, seperti lemahnya kompetisi politik, dominasi elite, serta terbatasnya pilihan bagi pemilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori elite sebagai pisau analisis, khususnya teori yang dikemukakan oleh Mufti (2019) yang membagi elit dalam tiga dimensi utama: kedudukan elite dalam struktur masyarakat, lembaga atau organisasi, dan sumber daya kekuasaan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan, termasuk partai politik, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pemilih kotak kosong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi pasangan calon petahana Herdiat-Yana didukung oleh seluruh partai politik di Ciamis, menjadikan tidak adanya kandidat penantang. Masyarakat merespons dengan berbagai cara, mulai dari menerima hingga memilih kotak kosong sebagai bentuk protes. Fenomena ini mencerminkan keterbatasan demokrasi substantif di tingkat lokal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi sistem pencalonan kepala daerah dan penguatan partisipasi politik masyarakat agar tercipta kompetisi politik yang sehat dalam pilkada di masa mendatang.

Kata Kunci: Pilkada, Calon Tunggal, Elite Politik, Dinamika Politik Lokal, Demokrasi

LATAR BELAKANG

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan manifestasi utama dari pelaksanaan demokrasi lokal di Indonesia. Melalui mekanisme ini, masyarakat diberi ruang untuk menentukan secara langsung figur pemimpin daerah yang dianggap mampu mewakili kepentingan publik dan membawa perubahan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena yang mengkhawatirkan dalam praktik Pilkada, yakni meningkatnya jumlah calon tunggal dalam kontestasi elektoral. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas demokrasi di tingkat lokal, mengingat kompetisi politik yang sehat merupakan salah satu prasyarat utama demokrasi yang substantif.



Sumber: Bawaslu RI (2021) dan KPU RI (2024)

Gambar 1. Fenomena Calon Tunggal di Indonesia

Berdasarkan gambar diatas, fenomena kenaikan calon tunggal dalam gelaran Pilkada Serentak meningkat drastis. Bawaslu RI (2021) mengungkapkan bahwa pada Pilkada 2015 hanya ada 3 (Tiga) calon tunggal, lalu Pilkada 2017 bertambah menjadi 9 (Sembilan) calon tunggal, dalam Pilkada 2018 bertambah menjadi 16 calon tunggal, dan Pilkada 2020 naik menjadi 25 calon tunggal. Pada Pilkada 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan bahwa ada 37 pasangan calon (paslon) tunggal yang akan menghadapi kotak kosong pada Pilkada Serentak 2024. jumlah ini berkurang dibandingkan jumlah sebelumnya di mana ada 44 bakal paslon yang mendaftar ke KPU dan sempat tak mendapatkan lawan. Pihak KPU menjelaskan paslon tunggal akan tetap diberi kesempatan menyampaikan visi dan misi dalam debat terbuka. Para paslon

tunggal juga tetap akan mengundi nomor urut. adapun semua paslon tunggal ini diusung oleh gabungan partai politik, tidak satu pun yang calon non-partai.

Kabupaten Ciamis termasuk salah satunya, di mana pasangan petahana Herdiat Sunarya dan Yana D Putra tampil sebagai satu-satunya pasangan calon dan didukung oleh seluruh partai politik yang ada di daerah tersebut. Kondisi ini menciptakan kontestasi yang tidak kompetitif dan berimplikasi pada terbatasnya pilihan politik bagi masyarakat. Meskipun secara prosedural sah, keberadaan calon tunggal menimbulkan perdebatan tentang apakah Pilkada semacam ini benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti fenomena calon tunggal dalam Pilkada di berbagai daerah. Rukiyanto (2017) mengkaji pemilihan dengan calon tunggal pasca putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Blitar, sementara Prihatmono dan Nugroho (2018) menggunakan pendekatan oligarkisme partai politik untuk menganalisis dinamika Pilkada tunggal di Kabupaten Pati. Penelitian Sujatmiko dan Ilham (2020) juga menunjukkan bagaimana faktor kekuatan petahana, biaya politik tinggi, dan lemahnya kaderisasi partai berkontribusi pada terbentuknya calon tunggal. Namun, kajian-kajian tersebut belum banyak menelaah bagaimana kekuatan elite politik bekerja dalam struktur sosial dan institusional di daerah yang relatif stabil secara politik seperti Ciamis.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggunakan pendekatan teori elite politik dari Mufti (2019) yang membagi pengaruh elite ke dalam tiga dimensi: kedudukan elite dalam struktur masyarakat, lembaga atau organisasi, dan sumber daya kekuasaan. Dengan pendekatan tersebut, studi ini menganalisis bagaimana dominasi pasangan Herdiat-Yana terbentuk dan didukung oleh konfigurasi politik lokal yang menyatu antara elite formal dan informal. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana masyarakat merespons kondisi ini, baik melalui penerimaan politik maupun bentuk resistensi simbolik seperti memilih kotak kosong.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membedah bagaimana praktik demokrasi lokal dapat terjebak dalam rutinitas elektoral yang prosedural tetapi minim substansi. Pilkada dengan calon tunggal bukan sekadar persoalan administratif, tetapi mencerminkan matinya ruang kompetisi politik akibat dominasi elite dan lemahnya regenerasi kepemimpinan lokal. Dalam konteks Kabupaten Ciamis, fenomena ini

menjadi titik penting untuk mengevaluasi sistem pencalonan dan peran partai politik dalam membentuk iklim demokrasi yang sehat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik dalam Pilkada calon tunggal Kabupaten Ciamis tahun 2024. Fokus analisis diarahkan pada konfigurasi kekuasaan elite politik, respon masyarakat terhadap keterbatasan pilihan, serta implikasi politiknya terhadap kualitas demokrasi lokal. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai Pilkada tunggal dan menjadi referensi dalam upaya mendorong reformasi sistem politik lokal yang lebih inklusif dan kompetitif.

KAJIAN TEORITIS

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan bentuk konsolidasi demokrasi di tingkat lokal yang bertujuan memperkuat legitimasi politik dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, demokrasi lokal tidak selalu menghadirkan kontestasi yang sehat. Salah satu manifestasi dari tantangan tersebut adalah fenomena calon tunggal dalam Pilkada yang semakin sering terjadi. Untuk memahami secara komprehensif dinamika politik yang melahirkan calon tunggal, terutama dalam konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Ciamis, digunakan berbagai perspektif teori yang saling melengkapi.

Menurut Zulfikar (2020), fenomena calon tunggal sering kali disebabkan oleh dominasi partai politik besar, tingginya biaya pencalonan, dan terbatasnya peluang bagi calon independen. Muhtadi (2018) bahkan menyebut calon tunggal sebagai “anomali dalam demokrasi kompetitif” karena menghilangkan alternatif pilihan bagi masyarakat. Menurut Yunus (2018) dan Widhiasthini (2020), dominasi partai besar dan buruknya kaderisasi politik menjadi faktor utama kemunculan calon tunggal. Partai-partai politik cenderung pragmatis dan hanya mendukung calon dengan elektabilitas tinggi, tanpa mempertimbangkan regenerasi politik. Hal ini menyebabkan tidak munculnya kandidat alternatif, terutama dari kalangan muda atau dari partai kecil yang tidak memiliki infrastruktur dan dukungan politik yang memadai.

Dinamika politik lokal menggambarkan interaksi antara kelompok kepentingan dan aktor-aktor lokal dalam proses perebutan kekuasaan. Menurut Diwiyanto dalam jurnal penelitian Simarmata, O. R. P. (2016) yang mengungkapkan bahwa dinamika politik mencerminkan sejauh mana proses politik mampu menunjukkan nilai demokrasi dan akuntabilitas. Dalam banyak kasus, dinamika ini dibentuk oleh kekuatan informal,

jaringan kekeluargaan, dan patronase politik, yang justru menghambat terbentuknya kompetisi yang adil. Dalam konteks Ciamis, struktur sosial dan kekuatan informal turut memperkuat dominasi pasangan petahana, yang menyebabkan tertutupnya ruang bagi kontestan baru.

Berbagai hambatan dan tantangan tersebut seyogyanya mampu disikapi dengan positif oleh para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat menjadi manfaat bagi pelaksanaan kehidupan berpolitik di Indonesia. Berbagai faktor hambatan dan tantangan Dinamika Politik menurut Rusfiana, Y., & Nurdin, I. (2017) yang saat ini sedang terjadi di Indonesia seolah-olah kini menjadi kambing hitam bagi setiap dampak politis atas setiap kebijakan yang diambil oleh para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor hambatan yang muncul. Berbagai faktor tersebut diperoleh dari hasil penggalian lebih dalam terhadap situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan yang terdapat dalam masyarakat kita. Beberapa faktor hambatan yang mempengaruhi dinamika politik tersebut diantaranya Pendidikan politik masyarakat yang rendah, Pengaruh feodalisme, Faktor kultural dan agama, Kemajuan informasi yang mengarah pada *Misleading*, Moralitas Elite Politik. Selain berbagai hambatan yang muncul, peluang bagi tercapainya dinamika politik domestik yang baik juga setidaknya membawa sedikit titik terang bagi pembangunan politik domestik. Berbagai peluang tersebut muncul setelah berbagai evaluasi dan pengamatan dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang yang terkait. Berbagai peluang tersebut diantaranya Perbaikan pendidikan politik, Sosialisasi media tentang politik, Kolaborasi dan integrasi budaya sistem politik, Perkembangan demokrasi, Kondusifitas situasi politik.

Elite politik menjadi faktor yang sangat dominan dalam membentuk dinamika politik di Indonesia (Harahap dkk, 2023). Meskipun mereka memiliki kekuasaan dan sumber daya yang besar, pengaruh mereka sering kali menciptakan ketimpangan dalam proses pemilu dan kebijakan politik. Moralitas di kalangan elite politik, serta pengaruh feodalisme yang masih ada, memperburuk situasi ini.

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori elite yang dikemukakan oleh Mufti (2019), dengan pembagian dalam tiga dimensi: kedudukan elite dalam struktur masyarakat, lembaga atau organisasi, dan sumber daya kekuasaan. Teori ini berpijak pada pemikiran klasik dari Pareto dan Mosca, yang menyatakan

bahwa setiap masyarakat pasti memiliki kelompok kecil yang memegang kekuasaan (*governing elite*), sementara sebagian besar masyarakat lainnya berada dalam posisi *non-elite*. Pareto memandang bahwa elite terdiri dari orang-orang yang memiliki keunggulan dalam bidang sosial, politik, atau ekonomi. Sementara itu, Mosca menekankan bahwa elite merupakan kelompok terorganisasi yang menjalankan fungsi-fungsi politik dan mendominasi pengambilan keputusan.

Mufti (2019) kemudian mengembangkan teori ini dalam konteks politik lokal Indonesia dengan menyoroti tiga aspek utama. Pertama, kedudukan elite dalam struktur masyarakat, yang mencerminkan posisi sosial yang dapat diperoleh melalui prestasi (*achieved status*) maupun warisan sosial seperti keturunan atau jaringan keluarga (*ascribed status*). Kedua, lembaga atau organisasi yang menjadi alat bagi elite untuk memperluas pengaruhnya, seperti partai politik, birokrasi, dan lembaga sosial. Ketiga, sumber daya kekuasaan, yakni akses terhadap modal politik, ekonomi, media, dan jaringan kekuasaan yang memungkinkan elite mendominasi ruang politik.

Ketika elite politik memiliki kontrol penuh terhadap lembaga politik, termasuk partai-partai besar, maka kemungkinan terbentuknya calon tunggal menjadi semakin besar. Ini terjadi karena elite berhasil mengkonsolidasikan dukungan partai dan melemahkan kekuatan oposisi. Dalam kasus Kabupaten Ciamis, pasangan petahana Herdiat-Yana didukung oleh seluruh partai politik di parlemen maupun partai non-parlemen, sehingga tidak muncul penantang yang dapat mendaftar secara sah ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis pada saat kontestasi pemilihan kepala daerah di tahun 2024 berlangsung saat itu.

Dalam hal ini partai politik cenderung membentuk “koalisi gemuk” untuk mendukung satu pasangan calon dan menutup peluang munculnya lawan politik, sebagaimana ditunjukkan oleh Prihatmono dan Nugroho (2018) dalam studi mereka di Kabupaten Pati. Mereka menggunakan perspektif Robert Michels tentang “hukum besi oligarki” yang menjelaskan bahwa partai politik cenderung berkembang menjadi struktur tertutup yang dikuasai oleh segelintir elite. Dalam konteks ini, lembaga politik tidak lagi menjadi sarana demokratisasi, melainkan instrumen untuk melanggengkan kekuasaan elite. Hal ini terlihat jelas di Kabupaten Ciamis, di mana pasangan Herdiat-Yana mendapat dukungan dari seluruh partai politik, sehingga tidak memberikan ruang bagi calon alternatif untuk maju.

Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai prosedur elektoral, melainkan harus menjamin kebebasan, keadilan, dan pilihan politik yang beragam. Etzioni dan Halevy (dalam Marwiyah, 2022) menyatakan bahwa dalam demokrasi diperlukan kebebasan sipil dan kerangka institusional yang menjamin adanya kompetisi yang adil. Dalam Pilkada calon tunggal, prinsip ini cenderung terabaikan karena minimnya alternatif dan lemahnya ruang kontestasi.

Rukiyanto (2017) meneliti dinamika calon tunggal di Kabupaten Blitar dan mengkaji dari sisi regulasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Sujatmiko dan Ilham (2020) dalam kajiannya di Kabupaten Grobogan menekankan pada faktor kekuatan petahana, lemahnya keberanian tokoh baru, serta biaya politik yang tinggi sebagai penyebab tidak munculnya calon alternatif.

Kedua studi tersebut memperlihatkan bahwa kemunculan calon tunggal adalah hasil dari dominasi elite, lemahnya sistem kaderisasi, dan politik elektoral yang tertutup. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini menekankan pada bagaimana dominasi elite politik Herdiat-Yana terbentuk dan beroperasi dalam konteks lokal Kabupaten Ciamis. Herdiat sebagai bupati petahana dan Yana sebagai wakil sekaligus ketua partai telah membangun kekuasaan melalui struktur sosial, partai politik, dan kontrol terhadap sumber daya publik. Bahkan setelah wafatnya Yana menjelang pemungutan suara, dominasi ini tetap bertahan, memperlihatkan kuatnya struktur elite dalam mengontrol dinamika politik lokal.

Pendekatan teori elite memberikan fondasi yang kuat dalam memahami fenomena calon tunggal dalam Pilkada. Penggunaan teori elite dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang tajam terhadap relasi kuasa, peran lembaga politik, serta pengaruh sosial dan ekonomi elite dalam membentuk situasi minim kompetisi. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai krisis demokrasi substantif di tingkat lokal, dengan menunjukkan bahwa fenomena calon tunggal bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga refleksi dari ketimpangan distribusi kekuasaan dan lemahnya mekanisme demokratisasi di daerah.

METODE PENELITIAN

Bagian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena politik yang kompleks, seperti munculnya calon

tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian kualitatif menurut Silalahi Ulber (2017) didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik yang lengkap dan dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Selain itu, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (Seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, H. H. (2005).

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kabupaten ini menjadi salah satu dari 37 daerah pada Pilkada Serentak 2024 yang menghadirkan hanya satu pasangan calon, yakni Herdiat Sunarya dan Yana D Putra, yang diusung oleh seluruh partai politik baik parlemen maupun non-parlemen. Konteks ini memberikan ruang bagi penelitian untuk menelaah lebih jauh bagaimana dominasi elite terbentuk dan dipertahankan, serta bagaimana respons masyarakat terhadap minimnya kompetisi politik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang dipilih yaitu pihak partai politik pengusung, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pemilih kotak kosong serta sumber data hasil pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sebagai penyelenggara pemilu. wawancara dalam penelitian kualitatif membantu menggali pandangan, persepsi, dan pengalaman partisipan secara lebih personal dan kontekstual. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses Pilkada, termasuk dinamika kampanye dan aktivitas masyarakat. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi, dengan mengkaji berita media, arsip KPU, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya.

Analisis data dalam penelitian ini menurut Abdussamad (2021) data dalam penelitian kualitatif dianalisis melalui membaca dan *mereview* data (catatan observasi, transkrip wawancara) untuk mendeteksi tema-tema dan pola-pola yang muncul. yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/*verifikasi*. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan

data mentah sesuai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan secara naratif dalam bentuk deskripsi tematik, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan mengaitkan data yang diperoleh terhadap kerangka teori dan temuan lapangan.

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara utuh konfigurasi kekuasaan lokal yang menyebabkan lahirnya calon tunggal di Kabupaten Ciamis, serta respons masyarakat dalam menghadapi kondisi politik yang prosedural namun minim dalam substansi demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap dinamika politik yang melatarbelakangi munculnya pasangan calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ciamis tahun 2024. Hasil penelitian dianalisis berdasarkan tiga dimensi utama teori elite menurut Mufti (2019), yaitu: kedudukan elite dalam struktur masyarakat, lembaga atau organisasi, dan sumber daya kekuasaan.

Kedudukan Elite dalam Struktur Masyarakat

Kedudukan elite dalam struktur masyarakat merupakan dimensi pertama dalam teori elite yang dikemukakan oleh Mufti (2019), yang menyatakan bahwa elite tidak hanya menempati posisi formal dalam lembaga politik, tetapi juga memiliki status sosial yang kuat di masyarakat. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Ciamis tahun 2024, pasangan Herdiat-Yana menempati posisi dominan dalam struktur sosial-politik lokal, baik secara simbolik maupun struktural.

Herdiat Sunarya adalah sosok birokrat senior dan tokoh masyarakat yang telah lama dikenal di Ciamis. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah dan kemudian terpilih sebagai Bupati pada periode sebelumnya. Dalam posisinya sebagai petahana, Herdiat bukan hanya menjadi representasi kekuasaan administratif, tetapi juga memiliki simbolisme kepemimpinan yang kuat di mata masyarakat. Kedekatan dengan warga, partisipasi dalam acara adat, keagamaan, dan sosial menjadi bagian dari strategi simbolik yang memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang “dikenal dan dekat”.

Sementara itu, Yana D Putra yang berakar dari seorang aktivis kemudian menjabat sebagai Wakil Bupati sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Ciamis menambahkan legitimasi ganda terhadap kekuasaan pasangan ini. secara struktural sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, dan secara

politis sebagai pengendali jaringan partai. Dengan latar belakang sebagai tokoh muda yang berpengaruh dan representatif di kalangan masyarakat, Yana memainkan peran penting dalam menjembatani dukungan antargenerasi dan memperluas basis sosial pasangan tersebut. Kedudukan mereka yang berasal dari dua generasi. Herdiat yang merupakan seorang yang berakar dari birokrat dan Yana sebagai yang berakar dari aktivis menciptakan keseimbangan simbolik yang menguntungkan dalam lanskap sosial-politik Ciamis.

Menurut informasi dari sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi, tidak ada figur lain yang memiliki kedudukan sosial sekuat Herdiat-Yana pada saat pencalonan berlangsung. Beberapa tokoh lokal mengakui bahwa dominasi sosial mereka membuat calon-calon alternatif merasa "tidak cukup kuat secara sosial maupun elektoral" untuk bersaing. Dalam konteks ini, status sosial menjadi hambatan kultural bagi regenerasi politik, karena masyarakat dan elite politik lokal cenderung mematuhi struktur hierarki kekuasaan yang sudah mapan.

Bahkan dalam beberapa wawancara, ditemukan narasi bahwa “akan sulit melawan Herdiat karena dia sudah dianggap bupati,” atau “masyarakat Ciamis itu menghormati pemimpinnya kalau sudah terbukti.” Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan bahwa kedudukan sosial tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga diterima secara kultural, sehingga memperkuat legitimasi elite. Hal ini sejalan dengan gagasan *ascribed status* dalam teori elite klasik, di mana kedudukan seseorang dalam masyarakat bukan hanya ditentukan oleh prestasi, tetapi juga oleh persepsi masyarakat terhadap legitimasi historis dan simbolis seorang pemimpin.

Namun, kedudukan elite ini juga menimbulkan sikap apatisme di sebagian masyarakat. Sejumlah warga menganggap Pilkada 2024 sudah bisa ditebak hasilnya, sehingga partisipasi cenderung menurun. Hal ini sesuai menurut Ketua KPU Kabupaten Ciamis Oong Ramdani (2025) menjelaskan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Ciamis 2024 tidak mencapai target. Sebelumnya KPU menargetkan partisipasi pemilih mencapai 85%, namun kenyataannya hanya di angka 71%. Dibanding dengan Pilkada 2018 lalu, angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 turun cukup signifikan. Pada tahun 2018, tingkat partisipasi mencapai 78%. Sedangkan untuk Pemilu atau Pileg dan Pilpres 2024, angka partisipasi bisa mencapai 80%. tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti banyak masyarakat yang berada

di luar kota tidak pulang untuk menyalurkan hak pilihnya. Kemudian ada kendala lain yang membuat pemilih tidak dapat datang ke TPS. Selain itu, pasangan calon tunggal di Pilbup Ciamis juga diduga menjadi salah satu faktor turunnya angka partisipasi pemilih.

Hal ini sesuai dengan pengamatan bahwa dominasi elite sering kali menghasilkan resistensi dalam bentuk pasif, seperti memilih kotak kosong atau tidak hadir ke TPS. Namun demikian terlepas dari itu, kemenangan telak ini menunjukkan masih besarnya kepercayaan masyarakat Ciamis terhadap kepemimpinan Herdiat-Yana, yang sebelumnya telah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati meskipun tingkat partisipasi menurun hingga 8 persen. Sayangnya, suasana kemenangan ini diselimuti duka karena Yana D Putra, calon wakil bupati terpilih, meninggal dunia sebelum proses pelantikan berlangsung.

Secara keseluruhan, kedudukan Herdiat-Yana dalam struktur masyarakat Ciamis tidak hanya mencerminkan kekuasaan politik elektoral, tetapi juga mencerminkan hegemoni sosial dan kultural yang membuat kehadiran calon alternatif menjadi tidak relevan. Elite dalam konteks ini bukan sekadar aktor dominan secara politik, tetapi juga aktor dominan secara sosial yang mampu mengatur arah dukungan publik tanpa perlu represi. Hal ini sesuai dengan kerangka Mufti (2019), yang menekankan bahwa struktur sosial dan legitimasi kultural merupakan fondasi penting dari keberlanjutan kekuasaan elite.

Lembaga atau Organisasi

Dimensi kedua menyoroti peran partai politik dan organisasi pendukung. Herdiat-Yana memperoleh dukungan dari seluruh partai politik di Parlemen maupun partai non-parlemen. Koalisi besar ini membentuk kekuatan politik yang sangat solid, menjadikan mereka sebagai satu-satunya pasangan calon. Ketua KPU Ciamis mengonfirmasi bahwa pasangan ini diusung oleh 18 partai politik dan menjadi satu-satunya pasangan yang mendaftar resmi.

Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya-Yana D Putra, resmi mendaftar ke KPU Kabupaten Ciamis pada Kamis 29 Agustus 2024. Pasangan Calon Herdiat-Yana didukung 18 partai politik yang terdiri dari 10 yang memiliki kursi di DPRD Ciamis yakni PAN dengan 7 (Tujuh) kursi, PDIP 7 (Tujuh) kursi, Gerindra 6 (Enam) kursi, Golkar 5 (Lima) kursi, PKB 5 (Lima) kursi, PKS 5 (Lima) kursi, PPP 4 (Empat) kursi, Nasdem 4 (Empat) kursi, PBB 1 (Satu) kursi dan

Demokrat 6 (Enam) kursi. Total 50 kursi. Termasuk juga 8 (Delapan) parpol non parlemen, yakni Partai Buruh, Partai Perindo, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Hanura, Partai Ummat, PKN dan PSI. Pasangan Herdiat-Yana dipastikan menjadi satu-satunya pasangan calon yang mendaftar ke KPU untuk Pilkada Kabupaten Ciamis 2024.

Ketua KPU Kabupaten Ciamis, Oong Ramdani, mengkonfirmasi bahwa pasangan Herdiat-Yana telah resmi mendaftar pada hari terakhir tahapan pendaftaran. semua partai di parlemen dan non parlemen mengusung dan mendukung Herdiat-Yana. Hal ini menjadi sejarah di Kabupaten Ciamis karena hanya ada calon tunggal di pilkada Ciamis. Oong menegaskan, pihaknya akan tetap menjalankan tahapan pilkada sesuai aturan.

Setelah Pilkada Kabupaten Ciamis 2024 terlaksanakan, pasangan calon tunggal Herdiat Sunarya dan Yana D Putra berhasil memenangkan pemilihan melawan kotak kosong. Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ciamis, pasangan Herdiat-Yana memperoleh 589.695 suara, sementara kotak kosong mendapatkan 70.665 suara. Namun, dua hari sebelum pemungutan suara, tepatnya pada Senin, 25 November 2024, calon wakil bupati Yana D Putra meninggal dunia akibat serangan jantung di Rumah Sakit Santo Borromeus, Bandung. Yana sempat mengeluhkan sesak napas sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Meskipun demikian, proses pemilihan tetap dilanjutkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pasangan Herdiat-Yana dalam memenangkan Pilkada melawan kotak kosong menunjukkan berbagai faktor yang berpengaruh dalam politik lokal di Kabupaten Ciamis. Salah satu faktor utama adalah kuatnya dukungan partai politik serta elektabilitas pasangan petahana yang telah dikenal oleh masyarakat. Selain itu, kinerja dan kebijakan yang telah diterapkan selama masa kepemimpinan sebelumnya menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat dalam memberikan dukungan.

Fenomena ini menunjukkan lemahnya fungsi kaderisasi di tubuh partai. Sebagaimana diungkap salah satu informan, partai lebih memilih "main aman" dengan mendukung kandidat yang berpeluang menang ketimbang mendorong kader internal. Hal ini memperkuat argumentasi Chairiyah dan Komarudin (dalam Marwiyah, 2022) yang menyatakan bahwa partai cenderung pragmatis dan enggan mencalonkan kader sendiri jika tidak menjamin kemenangan.

Sumber Daya Kekuasaan

Dalam dimensi ini penguasaan terhadap sumber daya kekuasaan merupakan dimensi krusial dalam teori elite Mufti (2019), yang menyebutkan bahwa elite politik mempertahankan dominasinya melalui akses terhadap modal ekonomi, sosial, politik, dan kultural. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Ciamis 2024, pasangan Herdiat-Yana secara jelas menunjukkan penguasaan terhadap berbagai sumber daya tersebut, yang kemudian mempersempit ruang kompetisi dan memperkuat posisi mereka sebagai calon tunggal.

Pertama, dari aspek sumber daya politik, pasangan Herdiat-Yana memiliki keunggulan sebagai petahana. Herdiat telah menjabat sebagai Bupati dan memiliki kontrol terhadap struktur birokrasi serta jejaring pemerintahan daerah yang luas. Pengaruh ini dimanfaatkan secara strategis untuk membangun loyalitas politik, baik di kalangan aparatur sipil negara (ASN) maupun di level pemerintahan desa. Sejumlah tokoh lokal secara terbuka menyatakan dukungannya. Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh politik personal yang dibangun selama masa kepemimpinan Herdiat.

Kedua, dari sisi sumber daya ekonomi, dominasi pasangan calon juga tampak dari kemampuan logistik kampanye dan distribusi alat peraga secara masif. Meskipun tidak menghadapi lawan politik, pasangan Herdiat-Yana tetap melakukan kampanye dalam berbagai bentuk baik secara konvensional maupun digital. Kegiatan kampanye ini tentu membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit, dan menunjukkan bahwa mereka memiliki sumber daya finansial yang mencukupi untuk mempertahankan hegemoni politik mereka. Tidak adanya penantang juga mengindikasikan bahwa biaya politik menjadi hambatan utama bagi tokoh-tokoh lain yang mungkin memiliki niat untuk maju, tetapi tidak memiliki akses finansial yang memadai.

Ketiga, dalam aspek sumber daya sosial dan kultural, pasangan ini memiliki jaringan yang luas dengan tokoh agama, tokoh adat, organisasi kepemudaan, hingga komunitas keagamaan. Mereka membangun hubungan patronase jangka panjang yang membuat banyak pihak merasa berkepentingan untuk mempertahankan stabilitas kepemimpinan. Menurut salah satu informan, “sebagian besar tokoh masyarakat sudah dekat dan nyaman dengan kepemimpinan yang sekarang, jadi rasanya tidak mungkin ada tokoh yang berani melawan.” Hal ini memperkuat tesis Mosca bahwa elite akan menciptakan jaringan sosial untuk mempertahankan kekuasaan secara berkelanjutan.

Keempat, pasangan Herdiat-Yana juga menguasai sumber daya media dan informasi. Selama masa kampanye, pemberitaan di media lokal cenderung menampilkan sisi positif dari kinerja petahana, sementara kritik atau diskursus tentang kotak kosong tidak mendapat ruang yang memadai. Di sisi lain, mereka memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk memperkuat citra elektoral. Konten yang diproduksi bersifat personal, akrab, dan menyentuh sisi emosional masyarakat. Strategi ini membuktikan bahwa penguasaan terhadap media dan narasi politik menjadi instrumen penting dalam mempertahankan dominasi.

Kelima, dominasi sumber daya kekuasaan juga tercermin dalam keberlangsungan pemilu meskipun calon wakil bupati, Yana D. Putra, wafat dua hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam banyak konteks politik, wafatnya calon bisa menjadi momentum disrupsi kekuasaan atau memunculkan resistensi. Namun, dalam kasus ini, tidak ada perubahan signifikan dalam orientasi pemilih. Hal ini memperlihatkan bahwa dominasi politik pasangan ini telah mengakar, tidak hanya pada figur individu, tetapi juga pada struktur kekuasaan dan jaringan loyalis yang sudah terbentuk dengan kuat.

Dengan menguasai seluruh bentuk sumber daya ini, pasangan Herdiat-Yana tidak hanya berhasil menjadi calon tunggal, tetapi juga mampu mengelola pemilu secara efektif tanpa adanya kompetisi yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan politik mereka bukan semata-mata karena kehendak rakyat, tetapi merupakan hasil dari pengelolaan sumber daya kekuasaan yang sangat sistematis. Situasi ini memperkuat argumen bahwa dalam konteks demokrasi lokal, elite dapat membentuk kondisi politik yang prosedural demokratis, namun substantifnya dikendalikan secara sentralistik oleh segelintir aktor dominan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Ciamis tahun 2024 yang merupakan hasil dari dominasi elite politik yang menguasai seluruh struktur sosial, lembaga politik, dan sumber daya kekuasaan. Dominasi tersebut terejawantahkan dalam tiga dimensi utama sebagaimana dijelaskan

oleh Mufti (2019), yakni kedudukan elite dalam struktur masyarakat, kontrol terhadap lembaga atau organisasi, dan penguasaan atas sumber daya kekuasaan.

Pasangan Herdiat-Yana menempati posisi sosial yang sangat kuat, baik secara simbolik maupun struktural. Kedekatan mereka dengan masyarakat, pengalaman sebagai petahana, serta kehadiran Yana sebagai representasi generasi muda menciptakan simbol kekuatan yang sulit ditandingi. Ketidakhadiran calon alternatif mencerminkan struktur sosial-politik yang hierarkis dan patronistik, di mana elite memiliki legitimasi yang tak mudah digugat.

Di sisi kelembagaan, partai politik di Ciamis berperan bukan sebagai wadah kaderisasi dan oposisi, melainkan sebagai perpanjangan tangan elite penguasa. Koalisi gemuk yang mendukung Herdiat-Yana menjadikan ruang pencalonan tertutup rapat bagi pihak lain. Hal ini memperlihatkan lemahnya demokratisasi internal partai dan pragmatisme politik yang berorientasi pada kemenangan semata.

Sementara itu, penguasaan terhadap sumber daya kekuasaan seperti birokrasi, logistik kampanye, jejaring sosial, organisasi masyarakat, dan media informasi memperkuat kontrol elite atas proses elektoral. Bahkan wafatnya calon wakil bupati dua hari sebelum pemungutan suara tidak mengganggu stabilitas elektoral pasangan ini, membuktikan bahwa sistem kekuasaan telah tertanam kuat dalam struktur politik lokal.

Respon masyarakat terhadap calon tunggal menunjukkan dualisme: sebagian mendukung karena kedekatan emosional dan keberhasilan pemerintahan sebelumnya, sementara sebagian lain menyalurkan protes melalui pilihan kotak kosong atau apatisisme. Penurunan partisipasi pemilih juga mencerminkan lemahnya semangat kompetisi dalam sistem yang prosedural demokratis namun substantifnya terbatas.

Dengan demikian, Pilkada calon tunggal di Ciamis tahun 2024 mencerminkan keterbatasan demokrasi lokal. Meskipun secara hukum sah, praktik politik seperti ini melemahkan prinsip-prinsip demokrasi substantif, khususnya dalam hal keterwakilan, partisipasi, dan akuntabilitas. Fenomena ini perlu dipahami bukan sekadar sebagai kegagalan teknis pencalonan, melainkan sebagai refleksi dari ketimpangan struktur kekuasaan dan lemahnya oposisi sistemik di tingkat lokal.

Saran

1. Kepada partai politik, diharapkan tidak hanya menjadi kendaraan kekuasaan, melainkan aktif melakukan pembinaan kader dan memberi ruang yang seimbang bagi munculnya calon alternatif. Penguatan demokrasi internal partai menjadi penting agar proses seleksi kandidat tidak didominasi oleh kalkulasi pragmatis semata.
2. Kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu, teruskan berupaya untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada pemilih terkait hak pilih terhadap kotak kosong dan memperluas pendidikan pemilih sebagai strategi memperkuat literasi politik masyarakat.
3. Kepada masyarakat sipil dan kelompok pemuda, perlu didorong partisipasi politik kritis dan aktif dalam mengawal jalannya demokrasi lokal. Kesadaran kolektif mengenai pentingnya pilihan politik yang rasional dan terbuka perlu dibangun melalui forum-forum dialog warga, diskusi publik, dan kampanye literasi demokrasi.
4. Kepada akademisi dan peneliti, fenomena calon tunggal dalam Pilkada perlu dikaji lebih lanjut dalam kerangka perbandingan daerah agar dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana struktur kekuasaan lokal memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami krisis kompetisi politik di tingkat lokal, serta menjadi refleksi penting dalam memperbaiki tata kelola demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan akuntabel di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari hasil skripsi penulis dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh Ciamis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Erlan Suwarlan, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Abdul Mutholib, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II atas segala bimbingan, masukan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi hingga artikel ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para informan yang telah menyempatkan waktu sehingga penulis bisa mendapatkan data, informasi dan wawasan penting dalam penelitian ini. penulis juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak

yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang setimpal.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Harahap, M., Sitanggang, W., & Jamaludin. (2023). *Elit politik di Indonesia: Akar dan dampak penyalahgunaan hak berdemokrasi*. Comserva: Jurnal Ilmu Administrasi & Politik, 3(6), 2149–2160.
- Ilham, T., & Sujatmiko, R. F. (2022). *Analisis Fenomena Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Grobogan Tahun 2020*. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 12(1), 1-11.
- Marwiyah, S. (2022). *Dinamika politik: Teori kontemporer*. Universitas Panca Marga.
- Mufti, M. (2019). *Teori-Teori Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhtadi, B. (2018). *Calon Tunggal dalam Pilkada: Sebuah Anomali Demokrasi?* Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal, 15(2), 123-134.
- Nawawi, H. H. (2005). *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prihatmono, A. R., & Nugroho, K. (2019). *Pilkada calon tunggal di Kabupaten Pati tahun 2017: Suatu tinjauan oligarkisme parpol*. Jurnal Politik Indonesia, 6(1), 32-43.
- Rukiyanto, N. (2017). *Dinamika pemilihan kepala daerah calon tunggal pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 (Studi kasus di Kabupaten Blitar tahun 2015)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Rusfiana, Y., & Nurdin, I. (2017). *Dinamika politik kontemporer: Internasional dan lokal dengan hambatan dan tantangan dalam pencapaiannya*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. (2017). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Simarmata, R. P. (2016). *Dinamika politik lokal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada): Refleksi Pilkada Serentak 2015 dan proyeksi Pilkada Serentak 2017*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 10(2), 38–55.
- Widhiasthini, N. W. (2020). *Dynamics of Single Candidate in Election of Regional Heads (Case study in Badung Regency, Bali Province)*. International Research Journal of Management, IT & Social Sciences, 7(6), 109-115.
- Yunus, N. R. (2018). *Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada*: Buletin Hukum dan Keadilan, 2(7), 69-70.
- Zulfikar. (2020). *Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 6(1), 45-60.